

**PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN
TANAH AKIBAT SALAH OBJEK TANAH DALAM SERTIPIKAT HAK
MILIK NO. 29/CIPEUNDEUY, KABUPATEN SUBANG DI HUBUNGKAN
DENGAN PASAL 385 KUHP JUNCTO PERPU NO. 51 TAHUN 1960
TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA HAK**

Oleh : Sugiarto

ABSTRAK

Tanah sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia. Namun harus kita sadari bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah akibat salah objek tanah yang sering terjadi ini merupakan penguasaan dan kepemilikan di dalam sertipikat hak milik bagi penerima haknya tidak memenuhi syarat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dan upaya hukum dari penguasaan dan kepemilikan tanah akibat salah objek di dalam sertipikat hak milik. Salah satu masalah yang muncul yaitu mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah akibat salah objek namun untuk memberikan perlindungan bagi penerima hibah maka penguasaan dan kepemilikan tanah akibat salah objek tanah tersebut dapat dilakukan mediasi sesuai dengan kasus Sertipikat Hak Milik No.29/Cipeundeuy, Kabupaten Subang. Permasalahan yang muncul dalam kasus salah penguasaan dan kepemilikan sebagian objek tanah dalam Sertipikat Hak Milik NO.29/Cipeundeuy,Kabupaten Subang inti masalahnya terletak pada penguasaan dan penggunaan tanah yang bukan menjadi haknya dengan unsur kesengajaan sehingga menimbulkan konflik pertanahan. Kepastian dan perlindungan hukum terhadap korbannya yaitu penerima hibah yaitu TNI AD menjadi gamang dan dipertanyakan. Masalah ini terjadi karena sebagian Sertipikat Hak Milik No. 29 a/n Subrata Ibrosetia telah di hibahkan kepada pihak TNI AD kemudian objek tanah tersebut di duduki,di kuasai dan di klaim oleh Wartam.

Metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan legal memorandum ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normative secara kualitatif deskriptif yaitu mencari kebenaran melalui rumusan hukum. Legal Memorandum ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis..

Akhir dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Wartam termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Dalam sistem negatif yang dianut dalam UUPA senantiasa memberikan kesempatan kepada seseorang yang merasa mempunyai hak yang lebih kuat untuk mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan, Badan Pertanahan Nasional harus segera melaksanakan proses penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku.

**SETTLEMENT OF LAND TENURE AND OWNERSHIP DISPUTES
DUE TO WRONG LAND OBJECT IN PRIVATE RIGHTS SERT. 29 /
CIPEUNDEUY, SUBANG REGENCY CONNECTED WITH ARTICLE 385
JUNCTO PERPU KUHP NO. 51 OF 1960 CONCERNING PROHIBITION
OF LAND USE WITHOUT RIGHT**

By: Sugiarto

ABSTRACT

Soil is needed for human survival. However, we must realize that ownership and ownership of land due to wrong land objects that often occur is the control and ownership in the certificate of ownership for the recipient of the rights does not meet the requirements. This study aims to determine the legal consequences and legal remedies of ownership and ownership of land due to wrong objects in the ownership certificate. One of the problems that arises is regarding the ownership and ownership of land due to wrong objects but to provide protection for the recipients of the land, the control and ownership of land due to the wrong land object can be mediated in accordance with the case of the Right of Ownership No.29 / Cipeundeuy, Subang Regency. Problems that arise in the case of misappropriation and ownership of some land objects in the Certificate of Ownership No. 29 / Cipeundeuy, Subang Regency, the core problem lies in the control and use of land which is not their right with intentional elements that cause land conflicts. Certainty and legal protection for the victims, namely grant recipients, namely the Army of the Republic of Indonesia became nervous and questionable. This problem occurs because some of the Right to Ownership Certificate No. 29 a / n Subrata Ibrosetia has been donated to the Army then the land object is occupied, controlled and claimed by Wartam.

The method used in completing this legal memorandum is by using normative legal research qualitatively that is seeking the truth through legal formulation consisting of the opinions of experts, theories and provisions of legal regulation. This legal memorandum research is conducted using normative juridical approach namely research conducted by researching library material or secondary data, the specification of this research is descriptive analytical.

The end of the discussion can be concluded that irregularities committed by Wartam are included in unlawful acts. In the negative system adopted in the LoGA, it always provides an opportunity for someone who feels that they have stronger rights to obtain legal certainty and a sense of justice, the National Land Agency must immediately carry out the process of resolving disputes and land conflicts based on applicable laws and regulations.